

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat 3 menyatakan bahwa: Pemerintah dan/atau Pemda menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Sementara itu, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Pasal 61 ayat 1 dinyatakan bahwa: pemerintah bersama-sama Pemda menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan pemberdayaan sekolah dalam mengelola sekolahnya telah dilakukan Depdiknas sejak lama. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, sekolah dikenalkan program pemberdayaan sekolah melalui Pengembangan Sekolah Seutuhnya (PSS) atau *School Integrated Development (SID)*. Namun, pada era otonomi daerah muncul program baru yang disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). PSS dan MPMBS nama berbeda tetapi jiwanya sama yaitu mengedepankan pemberdayaan sekolah dalam mengelola sekolahnya. PSS idenya, sedangkan MPMBS cara melaksanakan ide tersebut.

Paradigma baru era otonomi daerah versi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo PP Nomor 25 Tahun 2000 yang disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2003, telah dimulai sejak 1 Januari 2001. Sejalan dengan reformasi dan demokratisasi pendidikan yang sedang bergulir, pemerintah telah bertekad bulat untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan yang bertumpu pada pemberdayaan sekolah di semua jenjang pendidikan.

Berbagai kenyataan rendahnya mutu sekolah dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adalah manajemen pendidikan. Dalam kenyataannya, manajemen pendidikan termasuk manajemen dalam arti sempit atau manajemen sekolah yang selama ini bersifat sentralistik yang telah menempatkan sekolah pada posisi marginal, kurang diberdayakan tetapi malah diperdayakan, kurang mandiri, pasif atau selalu menunggu instruksi dari pusat, bahkan terpasungnya inisiatif dan kreativitas pengawas dan kepala sekolah serta guru untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Untuk itu, dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, Depdiknas terdorong melakukan reorientasi manajemen pendidikan dari manajemen pendidikan berbasis pusat menjadi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (*School-Based Management*) atau *site-based-management* atau di sekolah-sekolah dikenal dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).

Pergeseran pendekatan manajemen ini memerlukan penyesuaian baik teknis maupun nonteknis misalnya budaya. Penyesuaian teknis melalui penataran, workshop, seminar, dan diskusi, dan rapat sekolah tentang MPMBS,

sedangkan penyesuaian budaya melalui penanaman pemikiran, kebiasaan, tindakan sampai terbentuknya karakter MPMBS kepada semua warga sekolah (peserta didik, tenaga pendidikan, dan tenaga kependidikan) dan masyarakat (orang-tua, tokoh masyarakat, ilmuan, pengusaha, alumni, dan pemerintah) atau selanjutnya disebut stakeholder.

Konsep MPMBS ini telah berhasil di negara-negara maju, tetapi masih merupakan konsep baru bagi manajemen pendidikan di negara kita. Oleh sebab itu, penerapan MPMBS di negara kita tidak secara otomatis langsung sempurna. Untuk penyempurnaannya, praktisi pendidikan terutama pengawas sekolah bersama warga sekolah dapat merevisinya sesuai kebutuhan dan potensi sumber daya yang tersedia di sekolah masing-masing. MPMBS merupakan salah satu jawaban pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan dan telah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 51 ayat 1 yang berbunyi, “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Oleh sebab itu, MBS atau yang lebih terkenal MPMBS wajib diketahui, dihayati, dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia terutama mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

MPMBS hanya akan terlaksana apabila didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan, integritas, dan kemauan yang tinggi karena kalau tidak, MPMBS hanya akan menjadi eforia semata. Salah satu

unsur SDM dimaksud adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah sebagai faktor strategis dalam keberhasilan meningkatkan mutu sekolah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional khususnya pendidikan dasar dan menengah pada setiap jenjang satuan pendidikan, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan dan pelatihan serta peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan/perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Tetapi berbagai indikator menunjukkan bahwa mutu pendidikan belum meningkat secara signifikan. Sebagian kecil sekolah menunjukkan peningkatan mutu pendidikan secara menggembirakan, namun besar lainnya masih memprihatinkan.

SMA Muhammadiyah 1 Sragen, merupakan salah satu SMA Swasta yang telah menerapkan Manajemen Berbasis Mutu yang memfokuskan pada komponen guru, sarana prasarana, dan pendanaan. Namun dalam kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan, diantaranya adalah: (1) guru belum dapat berperan secara optimal, (2) sarana dan prasana belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran, (3) dukungan dana dari pemerintah dan masyarakat untuk pembiayaan sekolah masih minim.

Manajemen mutu merupakan sebuah filsafat dan budaya organisasi yang menekankan kepada upaya menciptakan mutu yang konstan melalui setiap aspek dalam kegiatan organisasi. Manajemen mutu membutuhkan pemahaman mengenai sifat mutu dan sifat sistem mutu serta komitmen manajemen untuk bekerja dalam berbagai cara. Manajemen mutu terpadu merupakan sistem yang

berfokus pada semua orang/tenaga kerja, bertujuan untuk terus-menerus meningkatkan nilai yang diberikan bagi pelanggan dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah daripada nilai suatu produk. Konsep manajemen mutu memerlukan komitmen semua anggota organisasi terhadap perbaikan seluruh aspek manajemen organisasi.

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji pengelolaan sekolah swasta berbasis mutu (studi situs di SMA Muhammadiyah 1 Sragen).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini, "Bagaimana pengelolaan sekolah swasta berbasis mutu? Fokus tersebut dibagi menjadi 3 sub fokus sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik pengelolaan guru berbasis mutu di sekolah swasta khususnya di SMA Muhammadiyah 1 Sragen?
2. Bagaimana karakteristik pengelolaan sarana dan prasarana berbasis mutu di sekolah swasta khususnya di SMA Muhammadiyah 1 Sragen?
3. Bagaimana karakteristik pengelolaan dana berbasis mutu di sekolah swasta khususnya di SMA Muhammadiyah 1 Sragen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fokus penelitian maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik pengelolaan guru berbasis mutu di sekolah swasta khususnya di SMA Muhammadiyah 1 Sragen
2. Untuk mendeskripsikan karakteristik pengelolaan sarana dan prasarana berbasis mutu di sekolah swasta khususnya di SMA Muhammadiyah 1 Sragen
3. Untuk mendeskripsikan karakteristik pengelolaan dana berbasis mutu di sekolah swasta khususnya di SMA Muhammadiyah 1 Sragen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen terkait dengan pengelolaan guru, sarana prasarana dan pembiayaan sekolah

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmiah, khususnya pada program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Studi Magister Manajemen.

#### **E. Daftar Istilah**

1. Pengelolaan berbasis mutu adalah kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

2. Pengelolaan guru adalah kegiatan kepala sekolah dalam memberdayakan guru dalam bidang kompetensi.
3. Pengelolaan sarana prasarana adalah kegiatan merencanakan kebutuhan, mengadakan, memelihara dan mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran
4. Pengelolaan dana adalah kegiatan merencanakan, menggunakan, dan mempertanggung jawabkan kebutuhan dana sekolah